



SINERGITAS FUNGSI MODAL SOSIAL (*SOCIAL CAPITAL*) DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA

Bambang Martin Baru¹⁾, Sripeni Rusbiyanti²⁾, Harianto³⁾

¹²³⁾Dosen Universitas Merdeka Madiun

Email: ¹⁾bambangmartinbaru@unmer-madiun.ac.id

Abstrak

Modal sosial merupakan sumber daya potensial penduduk desa yang penting dalam mendukung fungsi pemerintahan desa, hanya masalah seberapa jauh pemerintah desa memanfaatkan potensi modal sosial. Salah satu faktor yang dibutuhkan dalam sinergi antara potensi modal sosial dan fungsi pemerintahan desa adalah kepercayaan. Selama penduduk desa memiliki kepercayaan pada pemerintah desa, penduduk desa akan secara sukarela mendukung program kerja pemerintah desa, tetapi sebaliknya tidak ada kepercayaan / kepercayaan dari penduduk desa, ada kecenderungan menuju langkah-langkah pemerintah desa. Oleh karena itu, perlu membangun kepercayaan melalui komitmen pemerintah desa dalam memberikan layanan publik yang baik, serta orientasi terhadap kepentingan warga desa melalui peraturan / kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah desa.

Kata kunci: modal sosial, kepercayaan / kepercayaan, fungsi pemerintahan desa

Abstract

Social capital is a potential resource of villagers that is important in supporting the function of village governance, only the problem of how far the village government to utilize the potential of social capital. One of the factors needed in the synergy between the potential of social capital and the function of village government is trust. As long as the villagers have confidence in the village government, the villagers will voluntarily support the village government work program, but on the contrary there is no trust / trust of the villagers, there is aptism towards the steps of village government. Therefore, it is necessary to build trusts through the village government's commitment in providing good public services, as well as orientation to the interests of the villagers through regulation / policies produced by the village government.

Keywords: social capital, trust / trust, function of village government

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa sebagai suatu sistem pemerintahan terendah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sangat strategis dalam mendorong dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Rasyid (1996) dalam Martin Baru, dkk (2017), setidaknya ada tiga

fungsi pemerintahan yang hakiki yaitu: Pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat tergantung dari kemampuannya menjalankan ketiga fungsi tersebut.

Sementara, masyarakat menilai bahwa penyelenggaraan pemerintahan



selama ini belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat luas, dalam bidang pelayanan mengharapkan adanya pelayanan yang mudah, murah dan cepat dalam penyelesaiannya, namun realitasnya pelayanan publik masih dirasakan nuansa prosedur berbelit-belit, membutuhkan waktu lama dalam penyelesaiannya, dan membutuhkan biaya pelayanan yang tidak murah. Demikian pula dengan bidang pembangunan, ketidakberhasilan pembangunan desa disebabkan karena program pembangunan desa tidak sesuai dengan harapan warga desa. Nuansa kepentingan elit desa lebih dominan dibandingkan dengan kebutuhan warga desa, akibatnya tidak ada dukungan warga desa dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dilakukan atas dasar kepentingan pemerintah desa tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki oleh warga desa, banyak program pemberdayaan masyarakat desa yang pelaksanaannya sekedar memenuhi tuntutan program pemerintah saja, akibatnya program pemberdayaan masyarakat tidak mampu mendorong, memotivasi dan menginspirasi warga desa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Permasalahan diatas, dapat menimbulkan krisis kepercayaan warga desa terhadap pemerintahan desa dan membuat warga desa bersikap apatis, acuh tak acuh dengan segala kinerja pemerintahan desa. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan lembaga pemerintah desa melalui pemanfaatan potensi modal sosial. Dalam pandangan Suharto edi, (1997) bahwa selain modal financial dan modal manusia (*human capitals*), modal sosial dewasa ini semakin diakui sebagai faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Modal sosial sebagai sumber daya sosial yang dimiliki oleh masyarakat, dapat menjadi kekuatan atau daya yang luar biasa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Fukuyama

(1995), “*social capital as a series of values or informal norms are shared among the members of a group that allows the establishment of cooperation between them*” (Martin Baru, dkk: 2017). Dengan terwujudnya kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*) dan jaringan-jaringan (*networks*) akan menjadi lebih mudah dalam mengkoordinir berbagai potensi individu dalam mendukung program kerja pemerintahan desa. Menurut Coleman (1998), modal sosial berasal dari tindakan individu sebagai hasil interaksinya dan kemudian mendatangkan manfaat bagi publik. Sebagai atribut dari struktur sosial di mana seseorang terlibat di dalamnya, kapital sosial bukanlah kepemilikan pribadi yang bermanfaat hanya bagi orang-orang yang memilikinya. Modal sosial, disatu sisi memberikan manfaat bagi masyarakat dapat menjadi lebih mudah mengembangkan potensi diri melalui pemanfaatan kebersamaan dalam komunitas, dan disisi lain manfaat bagi pemerintah desa, melalui kebersamaan menjadi lebih mudah dalam menjalankan berbagai program kerja pemerintahan desa, sehingga mudah tercapainya target dan sasaran yang diharapkan.

Namun berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya memberdayakan modal sosial belum mampu menumbuhkan dan mengembangkan potensi modal sosial yang ada, sebab modal sosial membutuhkan *trust* (kepercayaan) warga desa terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, penguatan lembaga pemerintah harus dimulai dari upaya meyakinkan masyarakat bahwa apa yang dilakukan pemerintah dengan program kerjanya bertujuan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.

II. METODE PENELITIAN

Untuk memenuhi tujuan dari penelitian ini dilakukan di 5 (empat) kecamatan, Kabupaten Madiun dengan pertimbangan 5 kecamatan tersebut memiliki geografis, dan budaya berbeda,



sehingga dapat dipastikan survey yang beragam dengan populasi tersebut dapat menghasilkan data yang bervariasi. Dari 5 (lima) kecamatan, untuk masing-masing kecamatan diwakili 2 (dua) desa, yang dipilih berdasarkan teknik "Purposive Sampling". Menurut Sugiyono (2002), "purposive sampling adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja". Disamping itu, penentuan sampel ditetapkan berdasarkan subyek yang berkompenten serta secara langsung mengetahui, memahami, dan sekaligus terlibat didalamnya. Subyek penelitian masing-masing desa ditetapkan 20 orang terdiri dari: 3 orang perangkat desa, 2 orang BPD (Badan Permusyawaratan Desa), 2 orang LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan 3 orang RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga).

Teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara, daftar pertanyaan, dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan metode *deskriptif kuantitatif*, yaitu menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Untuk melakukan analisis data, yang datanya bersifat ordinal maka diperlukan skala pengukuran likert. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata antara lain: a) sangat setuju dengan skor 5, b) setuju dengan skor 4, c) ragu-ragu dengan skor 3, dan d) tidak setuju dengan skor 2, dan e) sangat tidak setuju dengan skor 1. Dengan mendasarkan pada skala pengukuran tersebut, maka dalam interpretasi data penelitian dilakukan melalui analisis modus, yaitu menilai suatu distribusi dengan frekuensi tertinggi. Klasifikasi nilai data dibedakan kedalam 5 (lima) kategori, yaitu: sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Modal Sosial

Modal sosial sebagai potensi warga desa dapat diberdayakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, karena telah berkembang tradisi kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan gotong royong warga desa. Salah satu unsur penting dalam membangun sebuah kebersamaan dibutuhkan *trust* (kepercayaan), sebab kepercayaan menjadi kekuatan untuk berkembangnya sebuah kegiatan kerja sama. Ini menunjukkan bahwa kekuatan modal sosial sangat tergantung kemampuan pemerintah dalam membangun *trust* kepada warga desa. Kepercayaan itu diwujudkan melalui tindakan secara nyata melalui program kerja yang dihasilkan untuk kepentingan warga desa. Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa: *trust* warga desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa belum sepenuhnya meyakini bahwa program kerja pemerintah desa diorientasikan untuk kepentingan kemajuan desa (FGD, 6 Juni 2017).

Pelibatan warga desa dalam setiap tahapan penyusunan program kerja sangat dibutuhkan, untuk meminimalisir adanya kesenjangan persepsi warga desa terhadap pemerintah desa. Keterlibatan warga desa tersebut, secara tidak langsung menjadi norma sosial yang melahirkan tanggung jawab sosial bagi warga desa atas keberhasilan pelaksanaan program kerja yang telah dihasilkan. Ini menjadi potensi sosial yang dapat didorong agar warga desa terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa: warga desa sangat kuat memegang kesepakatan sebagai bentuk norma sosial dalam menjaga keberlangsungan hubungan sosial, sehingga warga desa manakala terlibat dalam penyusunan program kerja menjadikan tanggungjawabnya untuk keberhasilan pelaksanaannya (FGD, 6 Juni 2017).

Kebersamaan menjadi tradisi dalam lingkungan masyarakat desa, seperti



RT/RW, kelompok pengajian, PKK, Kelompok Dasa Wisma masih seringkali terdapa kegiatan kebersamaan walaupun bentuknya kapasitasnya sederhana, misalnya gotong royong membersihkan lingkungan, adanya kegiatan olah raga bersama, pengajian, dan lain sebagainya. Nilai-nilai sosial tersebut masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat desa, bahkan nilai-nilai sosial telah diyakini menjadi pegangan dalam hidup bermasyarakat. Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa: nilai sosial yang menjadi warisan nilai leluhur masih dirasakan kuat dijalankan, dan bahkan sangat berat sanksi moral apabila terjadi pelanggaran, seperti dikucilkan atau dijauhi dalam hubungan sosial (FGD, 6 Juni 2017). Selengkapnya data terkait dengan potensi modal sosial dapat dilihat tabel. 1 dibawah ini.

Tabel 1 Potensi Modal Sosial Warga Desa, di Kabupaten Madiun 2017

Nilai Variabel (%)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat baik	28	28
Baik	38	38
Cukup baik	16	16
Kurang baik	14	14
Tidak baik	4	4

Sumber: Data primer diolah

Potensi modal sosial warga desa menunjukkan 28 % memiliki kekuatan sangat baik, 38 % dengan kekuatan baik, 16 % dengan kekuatan cukup baik, 14 % dengan kekuatan kurang baik, dan 4 % dengan kekuatan tidak baik. Dengan demikian potensi modal sosial kecenderungannya memiliki kekuatan yang baik, ini sangat potensi untuk didayagunakan dalam mendukung berbagai permasalahan sosial yang berkembang di pedesaan. Potensi ini menjadi kekuatan yang penting dalam mempercepat kemajuan-kemajuan desa melalui upaya mendukung berbagai program pemerintahan dan pembangunan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dilepaskan dari 3 (tiga) fungsi utamanya, yaitu fungsi pemerintahan, fungsi pemberdayaan masyarakat, dan fungsi pembangunan. Fungsi pemerintahan terkait dengan pelayanan publik. Sementara, masyarakat mengharapkan adanya pelayanan yang mudah, murah, dan cepat dalam penyelesaiannya, namun hasil temuan penelitian bahwa penyelenggaraan pelayanan di pemerintahan desa belum adanya perubahan yang lebih baik. Masih membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya karena seringkali pejabat desa tidak berada ditempat kerja, sehingga warga desa harus menunggu dan bahkan harus kembali lagi untuk mendapatkan legalitas dari pejabat desa yang berwenang (FGD, 6 Juni 2017). Ini menunjukkan bahwa profesionalisme pemerintahan desa masih relatif kurang baik, menurut Hossein (2000) dalam Waluyo (2007) mengemukakan bahwa: sumber daya manusia aparatur yang diperlukan adalah memiliki keterampilan dan kemampuan profesional dibidangnya, serta juga memiliki dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Rendahnya komitmen pejabat desa dalam pengabdian pada masyarakat menyebabkan terabaikan fungsi pelayanan masyarakat.

Sementara, fungsi pembangunan desa yang dimaksudkan untuk menjadi media perubahan yang lebih cepat dalam kehidupan masyarakat desa, juga belum dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar warga desa. Program pembangunan yang selama ini berjalan kurang menyentuh kebutuhan warga desa. Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa: Kebijakan pembangunan desa yang dihasilkan kurang dengan kebutuhan warga desa, dan lebih cenderung representasi kepentingan elit-elit desa (FGD, 6 Juni 2017). Pelibatan warga desa dalam forum-forum desa hanya sebatas formalitas saja, sebab rencana program pembangunan desa sudah dirancang jauh



sebelum adanya forum desa. Keterlibatan warga desa hanya sebatas pada pelaksanaan pembangunan saja, dan itu hanya semata-mata sebagai pekerja bukan tanggung jawab sebagai warga desa. Tidak jauh berbeda dengan program pemberdayaan masyarakat, hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa: fungsi pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif untuk mencapai target sarannya, sebab pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pemerintahan desa kurang sesuai dengan potensi dan keinginan warga. Akibatnya program pemberdayaan masyarakat tidak mampu mengubah dan memperbaiki kondisi masyarakat desa pada umumnya (FGD, 6 Juni 2017). Selengkapnya data penelitian terkait dengan fungsi pemerintahan dapat diikuti tabel. 2 dibawah ini.

Tabel. 2. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa, di Kabupaten Madiun 2017

Nilai Variabel	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat baik	14	14
Baik	10	10
Cukup baik	20	20
Kurang baik	38	38
Tidak baik	18	18

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembangunan desa menunjukkan 14 % memiliki nilai sangat baik, 10 % dengan nilai baik, 20 % dengan nilai cukup baik, 38 % dengan nilai kurang baik, dan 18 % dengan nilai tidak baik. Dengan demikian penyelenggaraan pembangunan desa berjalan kurang baik, ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah desa untuk lebih ditingkatkan dalam mempercepat kemajuan desa.

Sinergitas fungsi modal sosial dan fungsi pemerintahan desa

Modal sosial merupakan salah unsur sumber daya lokal yang sangat strategis apabila dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program kerja pemerintah desa. Caventa & Valderama

dalam Suhirman (2003) bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mendayagunakan sumber-sumber lokal yang mereka miliki yang secara kategoris terdiri dari: 1) Modal Manusia (*human resources*), yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga. 2) Modal Alam (*natural resources*), meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, sumberaya hayati dan sumber lingkungan hidup. 3) Modal Finansial (*financial Resources*), meliputi sumber-sumber keuangan yang ada seperti tabungan, pinjaman, subsidi, dan sebagainya. 4) Modal Fisik (*Phisichal Resources*), meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, peralatan produksi maupun sarana yang membantu manusia untuk memperoleh mata pencaharian. 5) Modal Social (*Social Captal Resources*), yakni jaringan kekerabatan dan budaya, serta keanggotaan dalam kelompok, rasa saling percaya, lembaga kemasyarakatan, pranata sosial dan tradisi yang mendukung, serta akses kepada kelembagaan sosial yang sifatnya lebih luas.

Modal sosial warga desa sangat potensi untuk dapat dimanfaatkan secara positif, karena warga desa masih sangat kuat memegang nilai-nilai sosial yang ditradisikan secara turun temurun, seperti nilai gotong royong, dan keswadayaan. Modal sosial dapat menjadi sumber daya sosial apabila mampu terwujud trust warga desa terhadap pemerintahan desa. Komitmen harus dibangun pemerintah desa agar warga desa meyakini bahwa program kerja yang dihasilkan oleh pemerintah desa benar-benar diorientasikan untuk kepentingan masyarakat luas. Dialog harus terus dilakukan untuk menemukan kesamaan kepentingan-kepentingan, dari keterlibatan warga desa dalam tahapan penyusunan program kerja akan dapat mendekatkan antara kepentingan warga desa dengan

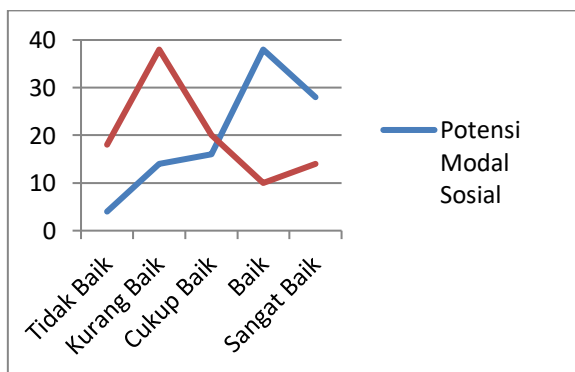
program kerja pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi modal sosial berkembang sangat baik, sehingga dapat menjadi sumber daya sosial dalam mendukung berbagai program kerja pemerintahan desa, selengkapnya data hasil temuan penelitian dapat dilihat dari tabel 3 dibawah ini.

Tabel. 3 Sinergitas Fungsi Modal Sosial dan Fungsi Pemerintahan Desa, di Kabupaten Madiun 2017

Kategori Nilai Variabel	Modal Sosial (%)	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Desa (%)
Sangat baik	28	14
Baik	38	10
Cukup baik	16	20
Kurang baik	14	38
Tidak baik	4	18

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel diatas, menunjukkan potensi modal sosial warga desa cenderung berkembang dengan baik (38 %), sedangkan penyelenggaraan pembangunan desa cenderung berjalan kurang baik (40 %). Dengan demikian, dapat diinterpretasikan nilai potensi modal sosial tidak diikuti dengan baiknya penyelenggaraan pembangunan desa, atau dengan kata lain potensi modal sosial warga belum dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa guna mendukung penyelenggaraan pembangunan desa. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti grafik 1. berikut ini.



Gambar 1. Sinergitas Fungsi Modal Sosial, dan Fungsi Pemerintahan Desa

Dari grafik diatas, menunjukkan modal sosial kecenderungan prosentase terbesar pada nilai baik, ini berarti modal

social sangat potensial sebagai sumber daya sosial yang dapat diberdayakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa. Warga desa memiliki potensi yang disebut dengan gotong royong, dan bahkan telah menjadi perekat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong termanifestasikan dalam bentuk kegiatan kerja sama antar warga desa yang diorientasikan untuk kepentingan umum. Hanya saja modal sosial sebagai potensi belum didayagunakan secara optimal oleh pemerintah desa, hal ini terlihat dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa kecenderungannya prosentase terbesar pada nilai kurang baik, artinya pembangunan desa selama ini belum sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan warga desa. Keterlibatan warga desa dalam proses pembangunan belum dilakukan secara aktif, dan bahkan kecenderungannya hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan formalitas saja. Potensi modal sosial dapat didayagunakan sepanjang menyangkut kepentingan umum, oleh karena itu pembangunan desa seharusnya dapat disinkronisasikan dengan kepentingan warga desa agar potensi modal sosial dapat digerakkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan sosial.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil temuan penelitian, menunjukkan masih rendah upaya pemerintah desa dalam memanfaatkan potensi modal sosial warga desa dalam menunjang fungsi pemerintahan desa. Dari hasil penelitian terdapat tiga hal yaitu:

1. Modal sosial warga desa sangat potensial untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa, misalnya kegiatan gotong royong dan keswadayaan masyarakat masih sangat melekat dalam lingkungan masyarakat desa.
2. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa masih kurang baik, khususnya orientasi program



kerja pemerintahan belum terjadi sinkronisasi dengan kepentingan warga desa.

3. Modal sosial sebagai sumber daya sosial belum dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa kurang adanya perhatian serius terhadap pelibatan warga desa dalam penyusunan program kerja pemerintahan. Sinkronisasi kepentingan warga desa dengan kepentingan pemerintah desa dapat menjadi dorongan tumbuhnya kepercayaan warga desa terhadap pemerintahan desa.

REFERENSI

- Martin Baru, dkk, 2017, *Utilization of capital in strengthening village government institutions*, Volume 7 No. 16 Research on Humanities and Social Sciences, IISTE.
- Coleman, 1998, <https://alisadikinwear.wordpress.com/.../modal-sosial-d...>, diakses tanggal 10 Mei 2017
- Fukuyama, Francis.1995. *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Hariato, dkk, 2017, *Money Politics and Horizontal Conflict in the Vehicle Choice*, Volume 7 No. 7 Developing Country Studies, IISTE.
- Rasyid, M. Ryaas. 1996, *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : Yarsif Watampoe.
- Suharto, Edi (1997).*Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung:Lembaga Studi Pembangunan-STKS
- Waluyo, 2007, *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bandung: CV. Mandar Maju.